

Local Currency Transaction sebagai Instrumen Kedaulatan Moneter Regional: Analisis Kepemimpinan Indonesia melalui QRIS Cross-Border di ASEAN

Muhammad Abdurrohim^{1*}, Flori Mardiani Lubis², Prilla Marsingga³

^{1,2,3} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Singaperbangsa Karawang

*Email korespondensi: 2210631260010@student.unsika.ac.id

Abstrak

Pesatnya digitalisasi sistem pembayaran di Asia Tenggara menempatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai lebih dari sekadar inovasi finansial domestik, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang bagaimana sebuah standar teknis pembayaran dapat dikonversi menjadi proyeksi pengaruh regional di kawasan yang secara normatif menolak kekuasaan koersif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Indonesia memanfaatkan QRIS Cross-Border sebagai instrumen kepemimpinan regional yang bersifat non-koersif dalam arsitektur pembayaran ASEAN. Dengan menggunakan pendekatan liberal-institusionalisme dan teori kepemimpinan regional Oran R. Young, yang mencakup kepemimpinan struktural, kewirausahaan, dan intelektual, penelitian kualitatif berbasis studi pustaka ini menelaah data sekunder dari dokumen bank sentral, laporan lembaga keuangan internasional, serta literatur akademik yang terbit antara 2019 hingga 2026. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia bekerja melalui dua jalur substantif yang saling melengkapi, yaitu penguatan kedaulatan moneter kawasan melalui Local Currency Transaction, dan pelebagaan standar teknis QRIS yang inklusif sebagai barang publik regional yang memperoleh legitimasi melalui Ketekuaan ASEAN 2023. Meskipun demikian, legitimasi fungsional ini masih berada pada tahap konsolidasi, dibatasi oleh asimetri stabilitas mata uang antarnegara anggota serta ketergantungan pada kesepakatan bilateral ad hoc, bukan rezim multilateral yang mengikat. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual bagi kajian kepemimpinan regional non-koersif di negara berkembang, sekaligus memberi masukan bagi pembuat kebijakan mengenai nilai strategis diplomasi digital dalam membentuk arsitektur keuangan kawasan.

Kata kunci: Kepemimpinan Regional; QRIS Cross-Border; Local Currency Transaction; Konektivitas Pembayaran ASEAN; Diplomasi Digital.

Local Currency Transactions as an Instrument of Regional Monetary Sovereignty: An Analysis of Indonesia's Leadership through Cross-Border QRIS in ASEAN

Abstract

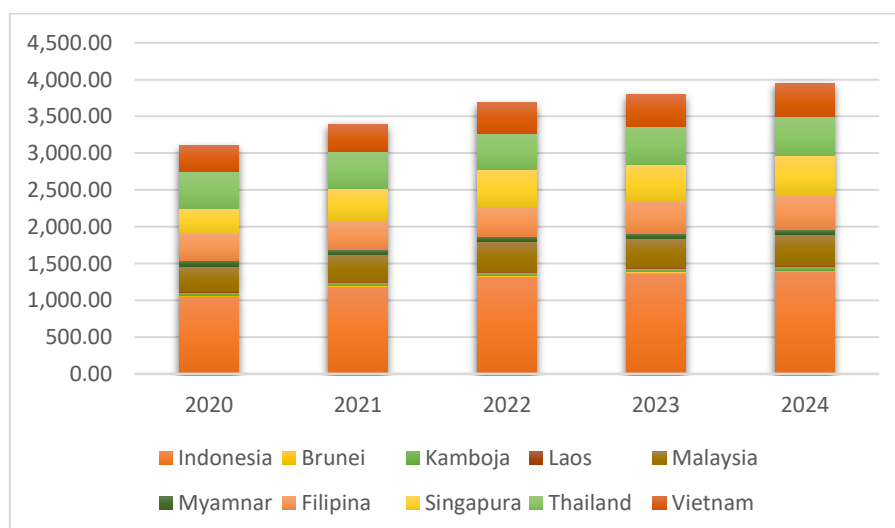
The rapid digitalization of Southeast Asia's payment systems has positioned the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as more than a domestic financial innovation, raising the question of how a technical payment standard can be converted into projections of regional influence in a region that normatively rejects coercive power. This study aims to analyze how Indonesia leverages QRIS Cross-Border as an instrument of non-coercive regional leadership within ASEAN's payment architecture. Employing a liberal-institutionalist approach and Oran R. Young's theory of regional leadership, encompassing structural, entrepreneurial, and intellectual leadership, this qualitative library research examines secondary data from central bank documents, international financial institution reports, and academic literature published between 2019 and 2026. The findings show that Indonesia's leadership operates through two interlocking pathways, namely strengthening regional monetary sovereignty through Local Currency Transactions, and institutionalizing QRIS's inclusive technical standards as a regional public good legitimized through Indonesia's 2023 ASEAN Chairmanship. However, this functional legitimacy remains at a consolidation stage, constrained by currency asymmetries among member states and reliance on ad hoc bilateral agreements rather than a binding multilateral regime. These findings contribute conceptually to the study of non-coercive regional leadership among developing states and inform policymakers on the strategic value of digital diplomacy in shaping regional financial architecture.

Keywords: Regional Leadership; QRIS Cross-Border; Local Currency Transaction; Regional Payment Connectivity; Digital Diplomacy.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pembayaran digital di Asia Tenggara telah melampaui fungsi teknis transaksi dan bertransformasi menjadi pilar strategis dalam dinamika ekonomi politik kawasan. Meningkatnya mobilitas masyarakat dan intensitas aktivitas lintas batas menuntut pembentukan infrastruktur finansial yang terintegrasi guna memitigasi ketergantungan pada sistem pembayaran global (Purrohman et al., 2025). Digitalisasi pembayaran pun bertransformasi menjadi instrumen diplomasi digital yang krusial bagi konektivitas kawasan, di mana integrasi sistem tidak lagi dipandang semata sebagai fasilitator pariwisata, melainkan sebagai manifestasi kedaulatan ekonomi dan inklusi finansial yang memperkuat blok ASEAN (Bank Indonesia, 2023a).

Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas dari keberhasilan QRIS di pasar domestik, yang ditopang oleh pertumbuhan transaksi digital yang akseleratif serta perluasan penggunaan di kalangan UMKM (Aryowiloto et al., 2024; Metri, 2024), sehingga QRIS kini dipandang bukan sekadar sebagai alat bayar, melainkan sebagai fondasi daya saing ekonomi sekaligus kedaulatan pembayaran nasional (Ulum et al., 2026; Sonjaya et al., 2025; Rachman et al., 2024).



Gambar 1. Produk Domestik Bruto (PDB) Negara-negara ASEAN dari 2020-2025

Sumber: (Statista, 2025) Telah diolah oleh penulis

Data pada Gambar 1 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas material yang dominan di kawasan Asia Tenggara, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai USD 1.396,3 miliar pada tahun 2024. Skala ekonomi ini secara signifikan melampaui negara-negara mitra seperti Singapura (USD 547,39 miliar) dan Thailand (USD 526,52 miliar), menempatkan Indonesia sebagai hegemon material yang memiliki *structural power* di kawasan (Statista, 2025). Dalam konteks transformasi digital inilah Bank Indonesia mengintroduksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada 17 Agustus 2019 sebagai upaya standardisasi infrastruktur pembayaran nasional yang bertujuan menciptakan sistem pembayaran interkonektif, efisien, dan inklusif bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) (Interactive QRIS, 2025).

Keberhasilan domestik tersebut melandasi ekspansi sistem melalui inisiatif QRIS *Cross-Border* yang dimulai pada 2022 antara Indonesia dan Thailand (Aryowiloto et al., 2024; Sarah, 2024), sebelum diperluas ke Malaysia, Singapura, dan mitra ASEAN lainnya (Rachman et al., 2024; Susilo, 2024), hingga akhirnya merambah Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok (Talaku et

al., 2026). Memasuki Agustus 2025, QRIS telah beroperasi lintas batas di sembilan negara, dan sejak akhir April 2026 juga telah dapat digunakan di Tiongkok (CNN Indonesia, 2026), dengan total nilai transaksi antarnegara mencapai sekitar Rp1,66 triliun hingga Juni 2025 (Interactive QRIS, 2025).

Fenomena di atas memperlihatkan sebuah paradoks analitis yang layak dikaji lebih jauh. Di satu sisi, negara-negara ASEAN terikat oleh norma *ASEAN Way* yang menjunjung prinsip non-intervensi, konsensus, dan anti-koersi, sehingga proyeksi pengaruh melalui cara-cara koersif atau *hard power* secara normatif sulit dilakukan di kawasan ini (Yukawa, 2017). Di sisi lain, Indonesia justru berhasil mendorong sejumlah negara mitra, termasuk kekuatan ekonomi besar seperti Tiongkok dan Korea Selatan, untuk mengadopsi standar teknis pembayaran nasionalnya secara sukarela dalam kurun waktu relatif singkat. Kesenjangan antara keterbatasan instrumen kekuasaan koersif Indonesia di kawasan dan skala keberhasilan difusi QRIS lintas negara inilah yang menjadi persoalan penelitian (*research problem*) yang mendesak untuk dijawab, yaitu melalui mekanisme apa sebuah standar teknis domestik dapat dikonversi menjadi pengaruh dan kepemimpinan regional dalam konteks kawasan yang secara normatif menolak proyeksi kekuasaan yang bersifat memaksa. Pertanyaan ini penting dijawab bukan hanya untuk memahami kasus QRIS secara spesifik, tetapi juga untuk memperkaya pemahaman tentang bentuk-bentuk kepemimpinan regional non-koersif di kawasan berkembang, yang selama ini kajiannya masih didominasi oleh studi kasus negara maju atau kekuatan besar (*great power*).

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan liberal-institusionalisme sebagai kerangka payung, yang berargumen bahwa kerja sama internasional dapat terwujud secara stabil melalui pembentukan rezim dan institusi bersama, bukan semata melalui distribusi kekuatan material (Keohane, 1984). Dalam perspektif ini, kepemimpinan sebuah negara tidak diukur dari kapasitasnya memaksa, melainkan dari kemampuannya memfasilitasi terciptanya aturan bersama (*rule-making*) yang menguntungkan seluruh pihak yang terlibat dalam rezim kerja sama tersebut.

Secara lebih spesifik, penelitian ini mengoperasionalkan konsep kepemimpinan tersebut melalui teori kepemimpinan regional Oran R. Young (1991), yang membedakan tiga mekanisme kepemimpinan dalam pembentukan rezim internasional: kepemimpinan struktural (*structural leadership*), yaitu kapasitas mengonversi keunggulan sumber daya material, dalam hal ini skala pasar dan basis ekonomi domestik, menjadi daya tawar dan pengaruh regional; kepemimpinan kewirausahaan (*entrepreneurial leadership*), yaitu kecakapan negosiasi dan penyusunan agenda (*agenda-setting*) untuk menyatukan kepentingan negara-negara anggota ke dalam satu kesepakatan institusional; serta kepemimpinan intelektual (*intellectual leadership*), yaitu kapasitas memproduksi gagasan atau desain teknis yang mampu memecahkan masalah tindakan kolektif (*collective action problem*) di kawasan. Ketiga elemen ini relevan digunakan untuk membedah kasus QRIS karena ekspansinya melibatkan konversi kapasitas ekonomi domestik (struktural), momentum diplomatik Keketuaan ASEAN 2023 (kewirausahaan), serta desain standar teknis yang inklusif dan terbuka (intelektual), sehingga kerangka Young menyediakan peta analitis yang selaras untuk menjelaskan bagaimana ketiga dimensi tersebut bekerja secara simultan dalam kasus ini.

Meskipun demikian, kajian akademik tentang QRIS yang tersedia hingga kini masih didominasi oleh fokus pada aspek inklusi keuangan domestik, efisiensi sistem pembayaran, serta perluasan ekosistem digital dalam negeri. Sebagian besar studi terdahulu berorientasi pada pasar

lokal dan adopsi pelaku usaha, menyoroti bagaimana QRIS meningkatkan efektivitas transaksi ritel dan persepsi kenyamanan pengguna (Pangestika et al., 2025), mendorong produktivitas serta peningkatan pendapatan pelaku UMKM (Alifia et al., 2024; Natsir et al., 2023), hingga mengidentifikasi tantangan regulasi, infrastruktur, dan literasi keuangan di tingkat domestik (Farhan & Shifa, 2023; Prawitasari et al., 2024).

Sementara itu, studi yang secara khusus membahas QRIS *Cross-Border* pun sejauh ini masih cenderung berhenti pada level teknis-operasional dan ekonomi-fungsional. Sejumlah kajian menilai bahwa skema ini mempercepat pembayaran ritel lintas batas, menurunkan friksi biaya transaksi, serta mendukung sektor pariwisata dan UMKM (Bani Rachmad & Raharjo, 2023; Arsyad & Fathoni, 2025), sementara kajian lain lebih menyoroti hambatan implementasi berupa kesenjangan infrastruktur, interoperabilitas teknis, literasi digital, keamanan, dan harmonisasi regulasi antarnegara (Ansari et al., 2024; Fazri et al., 2026; Aini, 2026). Sebagian kecil literatur memang telah mulai menempatkan ekspansi QRIS dalam kerangka ekonomi politik regional, misalnya dengan menyoroti bagaimana interoperabilitas pembayaran dan penggunaan mata uang lokal dapat memperkuat posisi tawar Indonesia (Azhar & Azmawati, 2024; Pravitasari et al., 2023) atau mendorong kemandirian konektivitas ekonomi ASEAN (Amalia, 2026; Bimantara & Nugraha, 2025; Susilo, 2024). Namun demikian, studi-studi tersebut umumnya belum menawarkan kerangka konseptual yang eksplisit untuk membedah mekanisme kepemimpinan regional yang menyertai difusi QRIS, sehingga dimensi politik-internasional dari fenomena ini, khususnya bagaimana sebuah instrumen teknis dapat dikonversi menjadi proyeksi kepemimpinan non-koersif, masih menyisakan celah akademis (*literature gap*) yang signifikan dan belum terjawab secara memadai.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Indonesia memanfaatkan QRIS sebagai instrumen untuk membangun kepemimpinan regional yang bersifat non-koersif dalam arsitektur pembayaran ASEAN, dengan menggunakan kerangka konseptual kepemimpinan struktural, kewirausahaan, dan intelektual dari Oran R. Young (1991) sebagai lensa analisis. Secara spesifik, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan mendasar: pertama, bagaimana peran QRIS mencerminkan proyeksi kepemimpinan regional Indonesia dalam kerja sama pembayaran ASEAN; dan kedua, melalui mekanisme institusional apa kepemimpinan tersebut dijalankan dalam kerangka konektivitas kawasan. Dengan menjawab kedua pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi studi kepemimpinan regional negara berkembang, sekaligus memberikan pemahaman empiris bagi pembuat kebijakan mengenai efektivitas diplomasi digital sebagai instrumen kebijakan luar negeri non-koersif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis peran QRIS sebagai instrumen kepemimpinan regional Indonesia dalam arsitektur pembayaran ASEAN. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami proses, makna, dan dinamika kebijakan lintas negara yang bersifat kontekstual dan tidak dapat direduksi secara memadai melalui pengukuran statistik (Creswell & Creswell, 2018). Data sekunder yang dianalisis dibatasi pada rentang waktu 2019 hingga 2026, mengikuti periodisasi alamiah dari peluncuran domestik QRIS hingga perluasan operasional lintas batasnya di kawasan ASEAN dan mitra strategis, sehingga temuan penelitian tetap kontekstual terhadap dinamika kebijakan yang sedang berlangsung (Bowen, 2009).

Data sekunder dihimpun melalui penelusuran dokumen resmi Bank Indonesia dan ASEAN, serta laporan lembaga keuangan internasional seperti Asian Development Bank (ADB), Bank for International Settlements (BIS), dan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). Kriteria inklusi ditetapkan secara ketat pada dokumen kebijakan resmi, siaran pers bank sentral, dan artikel jurnal terakreditasi yang membahas fintech, regionalisme, dan ekonomi politik internasional dengan fokus spesifik pada interkoneksi pembayaran lintas batas (*cross-border*); sementara kriteria eksklusi diterapkan untuk menyisihkan artikel opini non-institusional serta studi perilaku konsumen domestik murni yang tidak memiliki implikasi terhadap kebijakan regional. Prosedur seleksi berlapis ini penting dilakukan mengingat sifat dokumen sekunder yang beragam kualitas dan kredibilitasnya, sehingga kejelasan kriteria inklusi-eksklusi menjadi prasyarat bagi validitas temuan yang dihasilkan dari studi dokumen (Bowen, 2009).

Seluruh data sekunder yang lolos seleksi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yakni prosedur sistematis untuk mengidentifikasi pola dan makna dalam data tekstual secara objektif dan dapat direplikasi (Miles et al., 2014). Secara operasional, dokumen kebijakan yang terkumpul dipetakan ke dalam tiga indikator kepemimpinan regional menurut Oran R. Young (1991): kepemimpinan struktural, kepemimpinan kewirausahaan, dan kepemimpinan intelektual, sebagai kategori analisis (*coding categories*) untuk mengidentifikasi bagaimana masing-masing mekanisme termanifestasi dalam kebijakan dan praktik ekspansi QRIS. Melalui prosedur pengkategorian yang konsisten dengan kerangka teori tersebut, keabsahan dan objektivitas penarikan kesimpulan mengenai proyeksi kepemimpinan regional Indonesia dalam kerangka konektivitas pembayaran ASEAN dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa QRIS *Cross-Border* bekerja melalui dua jalur substantif yang saling menguatkan, yaitu penguatan kedaulatan moneter kawasan melalui skema *Local Currency Transaction*, dan pelebagaan standar teknis QRIS sebagai barang publik regional yang memperoleh legitimasi politik lewat momentum Keketuaan ASEAN 2023. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, pertumbuhan transaksi QRIS domestik dari 124,11 juta transaksi senilai Rp8,21 triliun pada 2020 menjadi 6,24 miliar transaksi senilai Rp659,93 triliun pada 2024 menjadi basis material bagi kedua jalur tersebut (GoodStats Data, 2025). Hingga Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta *merchant*, dengan 93,16 persen di antaranya berasal dari sektor UMKM, sehingga skala penggunaan domestik ini menjadi prasyarat material yang memungkinkan Indonesia memainkan peran signifikan di tingkat kawasan (Bank Indonesia, 2025a).

Tabel 1. Volume dan Nominal Transaksi QRIS 2020-2024

Tahun	Volume Transaksi	Nominal Transaksi
2020	124,11 juta	Rp8,21 triliun
2021	374,69 juta	Rp27,63 triliun
2022	1 miliar	Rp99,98 triliun
2023	2,14 miliar	Rp226 triliun
2024	6,24 miliar	Rp659,93 triliun

Sumber: GoodStats Data (2025), telah diolah oleh penulis

Kedaulatan Moneter Regional melalui Local Currency Transaction

Kapasitas pasar domestik yang besar memberi Indonesia posisi struktural yang kuat dalam kawasan, sebab logika jaringan digital membuat sistem pembayaran semakin bernilai ketika basis penggunaannya semakin luas. Jumlah pengguna dan *merchant* QRIS yang masif membuat negara mitra seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura menghadapi insentif ekonomi yang kuat untuk menyambungkan sistem pembayaran mereka dengan QRIS, sebab penolakan untuk terhubung berarti kehilangan potensi transaksi dari jutaan wisatawan dan konsumen Indonesia yang berkunjung ke negara mereka. Daya tarik pasar semacam ini bekerja secara halus, ia tidak memaksa negara mitra untuk tunduk, melainkan membuat penyambungan sistem menjadi pilihan yang secara ekonomi rasional untuk diambil, sebuah pola yang lebih dekat dengan proyeksi *soft power* ketimbang tekanan struktural konvensional (Aryowiloto et al., 2024). Kondisi ini penting dicermati karena posisi struktural semacam ini pada dasarnya bersifat pasif, ia hanya menjadi daya tarik potensial selama belum diaktifkan melalui agensi diplomatik yang konkret.

Bukti aktivasi tersebut terlihat pada kesepakatan *Regional Payment Connectivity* yang diprakarsai Bank Indonesia bersama bank sentral Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada penyelenggaraan KTT G20 di Bali pada November 2022, yang kemudian menjadi modal awal atau *critical mass* bagi perluasan kerja sama berikutnya (Bani Rachmad & Raharjo, 2023). Keberhasilan kelompok awal ini turut mendorong Vietnam untuk bergabung secara sukarela pada Agustus 2023, sebagaimana tercermin dalam kronologi negara mitra pada Tabel 2 (Talakua et al., 2026; Asian Development Bank, 2024). Momentum G20 yang dipilih sebagai panggung peluncuran RPC juga tidak sepenuhnya kebetulan, sebab forum multilateral tersebut memberi Indonesia ruang untuk membingkai konektivitas pembayaran regional sebagai bagian dari respons yang lebih besar terhadap fragmentasi arsitektur keuangan global, alih-alih sekadar kerja sama teknis antarbank sentral (Amalia, 2026). Pola ini menunjukkan bahwa kepemimpinan struktural Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan membutuhkan momentum diplomatik yang tepat agar potensi pasar dapat dikonversi menjadi komitmen institusional yang mengikat.

Tabel 2. Negara Mitra Penggunaan QRIS Lintas Negara

No.	Negara	Waktu Diresmikan
1	Thailand	Agustus 2022
2	Malaysia	Mei 2023
3	Singapura	November 2023
4	Jepang	Agustus 2025
5	Korea Selatan	April 2026
6	Tiongkok	April 2026

Sumber: Bank Indonesia (2022, 2023b, 2023c, 2025b), CNBC Indonesia (2024, 2025), dan Interactive QRIS (2024), telah diolah oleh penulis

Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong agenda *Local Currency Transaction* sebagai instrumen kedaulatan moneter kolektif kawasan. Melalui penggabungan sistem pembayaran digital dengan inisiatif LCT, Indonesia menawarkan solusi konkret bagi negara anggota untuk mengurangi risiko ketidakpastian nilai tukar akibat ketergantungan pada Dolar Amerika Serikat, tanpa perlu melakukan konfrontasi langsung terhadap tatanan moneter global yang berlaku (Han & Abdi, 2025). Peningkatan semacam ini sejalan dengan pola yang lebih luas, di mana perluasan penggunaan QRIS di kawasan cenderung dibaca sebagai akselerator kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN secara keseluruhan

(Sonjaya et al., 2025), sekaligus selaras dengan agenda ekonomi digital kawasan yang memang tengah didorong bersama oleh negara-negara anggota (Azhar & Azmawati, 2024). Akan tetapi, kelancaran narasi tersebut belum sepenuhnya tercermin di lapangan, sebab sejumlah kajian implementasi masih mencatat kendala regulasi dan integrasi teknis yang menghambat penyerapan skema pembayaran lintas batas secara merata di berbagai segmen pengguna (Rachman et al., 2024; Pravitasari et al., 2023).

Kesenjangan antara narasi kebijakan dan realitas implementasi ini menjadi lebih terasa ketika agenda LCT dihadapkan pada keragaman stabilitas moneter di ASEAN yang sesungguhnya cukup lebar. Kelompok ASEAN-5 memiliki mata uang dengan kredibilitas dan likuiditas yang relatif tinggi, sementara sejumlah mata uang lain seperti Kip Laos dan Kyat Myanmar masih rentan terhadap inflasi tinggi dan ketidakpastian politik domestik (AMRO, 2024). Penggunaan mata uang lokal yang tidak stabil untuk transaksi lintas batas berpotensi memindahkan beban risiko nilai tukar kepada pelaku UMKM dan penyedia jasa pembayaran, terutama karena pasar lindung nilai bagi mata uang non utama tersebut belum berkembang secara memadai (AMRO, 2024), dan belum lagi persoalan perlindungan hukum konsumen lintas batas yang hingga kini masih menunggu payung regulasi yang lebih definitif di tingkat kawasan (Aini, 2026). Dengan demikian, keberhasilan LCT dalam memperkuat kedaulatan moneter kawasan tampak lebih terjamin bagi negara dengan fundamental ekonomi yang kuat, sementara bagi negara dengan mata uang yang lebih rentan, skema ini berpotensi menimbulkan beban baru yang belum sepenuhnya diantisipasi dalam desain kebijakan saat ini.

Standardisasi Teknis sebagai Barang Publik Regional dan Legitimasi Kepemimpinan Fungsional

Selain aspek moneter, kepemimpinan Indonesia juga tercermin dari kemampuannya mengangkat standar teknis QRIS menjadi komitmen politik tingkat tinggi di kawasan. Momentum ini mencapai puncaknya ketika Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada tahun 2023, di mana pada penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia memelopori lahirnya *ASEAN Leaders' Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction* (Bimantara & Nugraha, 2025). Melalui deklarasi tersebut, isu teknis interoperabilitas pembayaran yang sebelumnya hanya menjadi urusan bank sentral berhasil diangkat menjadi komitmen politik strategis di tingkat kepala negara, sebuah capaian yang juga tidak lepas dari posisi Indonesia yang sejak lama aktif mendorong kerja sama inovasi digital di antara sesama negara anggota melalui kerangka *Master Plan on ASEAN Community* (Susilo, 2024). Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, capaian diplomatik ini tercermin dari perluasan cakupan negara mitra QRIS lintas batas yang terus bertambah dari tahun ke tahun, mulai dari Thailand pada 2022 hingga Tiongkok pada 2026.

Keberhasilan diplomatik tersebut tidak lepas dari desain teknis QRIS itu sendiri, yang dibangun dengan prinsip terbuka dan fleksibel sehingga memungkinkan interoperabilitas dengan berbagai platform pembayaran asing tanpa menuntut negara mitra merombak total kedaulatan sistem perbankan domestik mereka (Bani Rachmad & Raharjo, 2023). Fleksibilitas desain ini pula yang membuat manfaatnya terasa hingga ke level pelaku usaha kecil, membuka peluang integrasi global dan konektivitas lintas batas bagi UMKM yang sebelumnya sulit menjangkau pasar regional (Metri, 2024), sekaligus turut membentuk pengalaman positif wisatawan Indonesia yang berpelesir di negara tetangga sebagai salah satu penopang pariwisata berkelanjutan kawasan (Arsyad & Fathoni, 2025).

Desain inklusif ini kemudian memperoleh pengakuan dari lembaga keuangan internasional, di mana *Bank for International Settlements* melalui *Project Nexus* mengafirmasi bahwa interoperabilitas pembayaran bilateral di ASEAN dapat menjadi rujukan bagi pengembangan sistem pembayaran instan multilateral secara lebih luas (*Bank for International Settlements*, 2023). Efektivitas pendekatan ini turut divalidasi secara empiris melalui efisiensi biaya, di mana integrasi QRIS *Cross-Border* mampu memangkas *merchant discount rate* lintas batas secara signifikan dibandingkan sistem pembayaran global yang membebankan biaya hingga tiga persen (Shofihawa, 2025).

Namun demikian, legitimasi yang lahir dari efisiensi teknis ini belum tentu berbanding lurus dengan kesiapan kelembagaan di seluruh kawasan. Perluasan QRIS lintas batas sejauh ini masih berlangsung melalui rangkaian kesepakatan bilateral yang disepakati satu demi satu dengan masing-masing negara mitra, bukan melalui satu rezim multilateral yang mengikat seluruh anggota ASEAN sekaligus, dan kekosongan aturan induk semacam ini pula yang mendasari desakan sejumlah kalangan agar segera dibentuk kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi konsumen dalam transaksi lintas negara (Aini, 2026; Ansari et al., 2024).

Ketimpangan pelebagaan ini turut terlihat dari sisi penerimaan pengguna di lapangan, di mana adopsi metode pembayaran QR lintas batas oleh wisatawan tidak selalu berjalan mulus dan masih dibayangi kekhawatiran soal keamanan transaksi yang berpotensi menghambat kepercayaan penuh terhadap sistem baru ini (Fazri et al., 2026). Pola kerja sama yang bersifat ad hoc semacam ini memang sejalan dengan norma *ASEAN Way* yang menjunjung konsensus dan menghindari pemaksaan (Yukawa, 2017), namun pada saat yang sama menyisakan kerentanan, sebab keberlanjutan jaringan pembayaran regional ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan domestik Indonesia maupun kesediaan politik masing-masing negara mitra untuk terus memperbarui kesepakatan bilateralnya. Dengan demikian, kepemimpinan fungsional Indonesia melalui QRIS pada dasarnya masih berada pada tahap konsolidasi, dan keberlanjutannya di masa depan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana Indonesia mampu mendorong pelebagaan yang lebih permanen di tingkat ASEAN secara kolektif, bukan sekadar mengandalkan akumulasi perjanjian bilateral semata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa QRIS mencerminkan proyeksi kepemimpinan regional Indonesia melalui perpaduan antara kapasitas ekonomi domestik yang besar dan kemampuan diplomatik untuk mengonversi kapasitas tersebut menjadi komitmen politik kawasan. Skala pasar dan basis pengguna QRIS yang masif memberi Indonesia daya tarik struktural yang membuat negara mitra terdorong menyambungkan sistem pembayarannya secara sukarela, namun daya tarik ini baru benar-benar terwujud menjadi kepemimpinan yang nyata ketika diaktifkan melalui momentum diplomatik, terutama saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada 2023 dan berhasil mengangkat interoperabilitas pembayaran serta agenda *Local Currency Transaction* menjadi komitmen politik tingkat kepala negara. Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia dalam kasus ini tidak lahir dari satu sumber kekuatan tunggal, melainkan dari interaksi antara kapasitas material yang pasif dan agensi diplomatik yang secara aktif membingkai kapasitas tersebut menjadi kepentingan bersama kawasan.

Adapun mekanisme institusional yang menjalankan kepemimpinan tersebut terlihat dari dua jalur yang saling melengkapi. Pada dimensi moneter, integrasi LCT memberikan Indonesia

dan negara mitra jalur untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang hegemonik, meski manfaatnya masih lebih terjamin bagi negara dengan fundamental ekonomi yang kuat dibandingkan negara dengan mata uang yang relatif rentan. Pada dimensi institusional dan politik, standar teknis QRIS yang inklusif dan terbuka berhasil diposisikan sebagai barang publik regional yang memperoleh pengakuan lembaga keuangan internasional, sementara pelembagaannya di tingkat kawasan masih berlangsung melalui rangkaian kesepakatan bilateral dan belum sepenuhnya terikat dalam satu rezim multilateral formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi Indonesia sebagai pemimpin fungsional kawasan sesungguhnya masih berada pada tahap konsolidasi, bukan tahap yang telah mapan sepenuhnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek metode, sebab analisis sepenuhnya bersandar pada data sekunder berupa dokumen resmi, siaran pers, dan artikel jurnal, tanpa didukung data primer dari pemangku kepentingan terkait seperti otoritas moneter negara mitra, pelaku UMKM lintas batas, atau Sekretariat ASEAN, sehingga interpretasi yang dihasilkan lebih banyak merefleksikan perspektif kebijakan resmi Indonesia dibandingkan pengalaman langsung aktor di lapangan. Penelitian selanjutnya perlu melengkapi keterbatasan ini melalui wawancara atau survei terhadap otoritas moneter dan pelaku usaha di negara mitra guna menangkap persepsi lintas negara secara lebih berimbang, serta dapat memperluas cakupan dengan studi komparatif terhadap skema konektivitas pembayaran lain di kawasan lain sebagai pembanding, maupun kajian lebih mendalam mengenai pengelolaan risiko nilai tukar dalam skema LCT bagi negara dengan mata uang yang kurang stabil.

Conflict of Interest

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian ini.

Funding

Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari pihak mana pun.

AI Usage Statement

Penulis menyatakan tidak menggunakan AI generatif dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel. AI generative hanya digunakan untuk pra penelitian berupa drafting dan brainstorming. Seluruh isi artikel ini sudah divalidasi dan menjadi tanggung jawab penulis.

Data Availability

Data penelitian tersedia dari correspondent author dan dapat diverifikasi jika ada permintaan, bisa disampaikan melalui email.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, M. Z. Q. (2026). Urgensi pembentukan aturan induk bagi QRIS untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen dalam integrasi transaksi ASEAN. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 36–45. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v3i1.1525>
- Alifia, N., Permana, E., & Harnovinsah, H. (2024). Analisis penggunaan QRIS terhadap peningkatan pendapatan UMKM. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, 9(1).

- Amalia, R. (2026). Digital diplomacy in the era of fragmentation: Indonesia's strategy to keep pace with global financial hegemony through regional payment connectivity. *Journal of Social Research*, 5(5), 2028–2037. <https://doi.org/10.55324/josr.v5i5.3142>
- ASEAN+3 Macroeconomic Research Office. (2024). *Annual consultation report on Indonesia*. AMRO.
- Ansari, Y., Sunarmi, & Sukarja, D. (2024). Legal aspects of cross-border electronic commerce transactions with Quick Response Code (QR Code) based payments in the ASEAN Cooperation Framework. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6), 2419–2429. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.767>
- Arsyad, R., & Fathoni, M. (2025). Indonesian tourists' QRIS adoption in supporting sustainable tourism across Southeast Asia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1). <https://doi.org/10.18196/jhi.v14i1.28702>
- Aryowiloto, J., Numadi, K. R., & Manggo, T. N. (2024). QRIS Cross-Border: Indonesia's soft power diplomacy instrument in payment digitalization in Southeast Asia. *WIMAYA*, 5(2), 108–121. <https://doi.org/10.33005/wimaya.v5i02.168>
- Asian Development Bank. (2024). *Asian economic integration report 2024: Decarbonizing global value chains*. ADB.
- Azhar, R. M., & Azmawati, D. (2024). Indonesia's efforts in supporting ASEAN digital economy by expanding the use of QRIS in Southeast Asia. *SHS Web of Conferences*, 204, Article 02004. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202420402004>
- Bani Rachmad, A. A., & Raharjo, M. (2023). 'QRIS Cross Border' as digital financial inclusion acceleration in Southeast Asia. *Global Local Interactions: Journal of International Relations*, 3(1), 151–161. <https://doi.org/10.22219/gli.v3i1.25234>
- Bank for International Settlements. (2023). *Project Nexus: Enabling instant cross-border payments*. BIS Innovation Hub.
- Bank Indonesia. (2022, 29 Agustus). *Indonesia dan Thailand meresmikan implementasi pembayaran kode QR lintas negara* [Siaran pers]. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2423222.aspx
- Bank Indonesia. (2023a, 28 Maret). *Digitalisasi pembayaran dan keuangan inklusif negara ASEAN bagi kemanfaatan dunia* [Siaran pers]. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_257823.aspx
- Bank Indonesia. (2023b, 8 Mei). *Indonesia and Malaysia announce the commercial launch of the cross-border QR payment linkage* [Siaran pers]. https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2511623.aspx
- Bank Indonesia. (2023c, 17 November). *Launch of cross-border QR payments linkage between Indonesia and Singapore* [Siaran pers]. <https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2023/launch-of-cross-border-qr-payments-linkage-between-indonesia-and-singapore>
- Bank Indonesia. (2025a, 4 Agustus). *QRIS jelajah Indonesia 2025 dorong digitalisasi dengan wisata budaya* [Siaran pers]. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2717025.aspx
- Bank Indonesia. (2025b, 25 Agustus). *QRIS Indonesia–Jepang perkuat konektivitas pembayaran* [Siaran pers]. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2719825.aspx

- Bimantara, A., & Nugraha, R. T. (2025). Politics of international cooperation in cross-border digital payment connectivity: A case study of QR payment system in ASEAN. *Sospol*, 11(1), 82–99. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v11i1.38367>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRI0902027>
- CNBC Indonesia. (2024, 3 April). *Top! QRIS bakal bisa dipakai di Brunei & Laos*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240403151743-17-527971/top-qris-bakal-bisadipakai-di-brunei-laos>
- CNBC Indonesia. (2025, 11 September). *BI gandeng China perluas upaya buang dolar lewat LCT & QRIS*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250911123851-17-666084/bi-gandeng-china-perluas-upaya-buang-dolar-lewat-lct-qris>
- CNN Indonesia. (2026, 1 April). *Jajan di China bisa pakai QRIS mulai bulan depan*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260401173438-78-1343467/jajan-di-china-bisa-pakai-qris-mulai-bulan-depan>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Farhan, A., & Shifa, A. W. (2023). Penggunaan metode pembayaran QRIS pada setiap UMKM di era digital. *JPKMN (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara)*, 4(2), 1045–1052. <https://doi.org/10.5538/jpkmn.v4i2.1045>
- Fazri, N. N. O., Othman, Z., Ahmad, N. A., Kedin, N. A., & Bakhtiar, M. F. S. (2026). Perceived security, intention to adopt and actual usage behavior of DuitNow among Indonesian tourists in Malaysia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 10(3), 343–354. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2026.100300021>
- GoodStats Data. (2025). *Volume dan nominal transaksi QRIS 2020–2024*. GoodStats.
- Han, B., & Abdi, R. (2025, 17 April). *Enhancing regional payment connectivity across ASEAN+3 economies*. AMRO. <https://amro-asia.org/enhancing-regional-payment-connectivity-across-asean3-economies>
- Interactive QRIS. (2024, 22 Juli). *QRIS bakal segera bisa digunakan di Korea Selatan*. <https://qris.interactive.co.id/homepage/qris-news-detail.php?lang=en&page=55&qris-bakal-segera-bisa-digunakan-di-korea-selatan>
- Interactive QRIS. (2025, 22 Agustus). *Sejarah QRIS 2019–2025: Dari standarisasi nasional hingga ekspansi lintas negara*. <https://qris.interactive.co.id/homepage/blog-detail.php?lang=en&page=Mjlx-sejarah-qris-2019%E2%80%932025--dari-standarisasi-nasional-hingga-ekspansi-lintas-negara>
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy* (Revised ed.). Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7sq9s>
- Metri, D. P. (2024). Advancing MSMEs through global integration and cross-border connectivity: Opportunities for QRIS-based payment code development. *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(1), 113–125. <https://doi.org/10.57096/edunity.v3i1.221>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Natsir, K., Bangun, N., Attan, M. B., & Landias, J. S. (2023). Penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital untuk meningkatkan produktivitas UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2).

- Pangestika, Z. N., Putri, D. K., Angelica, S. F., Nuryana, I., & Nihayah, D. M. (2025). Systematic literature review: Persepsi penggunaan QRIS sebagai peningkatan efektivitas alat pembayaran dan sistem keuangan digital. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 13(2), 103–115. <https://doi.org/10.26740/jupe.v13n2.p103-115>
- Pravitasari, E., Simamora, V., & Novitasari, I. (2023). QR cross-border in increasing financial integration in ASEAN. *Proceedings of the 4th International Seminar and Call for Paper*, 364–369. <https://doi.org/10.5220/0012582300003821>
- Prawitasari, D., Badiani, F. D., Rachmawati, S. D., Ningrum, F. P., & Mufidah, N. L. (2024). QRIS in Indonesia: A comprehensive literature review on adoption, challenges, and opportunities. *Revenue: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.24042/revenue.v5i1.22760>
- Purrohman, P. S., Ruslan, A., Lidiaputri, H., & Azizah, Z. N. (2025). *Dinamika perdagangan internasional dan transformasi ekonomi global*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Rachman, A., Julianti, N., & Arkoyah, S. (2024). Challenges and opportunities for QRIS implementation as a digital payment system in Indonesia. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2024.8.1.2134>
- Sarah, F. (2024). Marketing strategy for QRIS Cross Border as a feature for FILPay app. *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(7), 5859–5869. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i7-106>
- Shofihawa. (2025, 23 April). *QRIS perkuat kedaulatan digital Indonesia tanpa menghambat perdagangan global*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/4122-qr-is-perkuat-kedaulatan-digital-indonesia-tanpa-menghambat-perdagangan-global>
- Sonjaya, A., Ragimun, Basmar, E., Ermawati, T., Kurniadi, A. P., Dasilva, H., Sabilla, K., Hasan, Takhim, M., Pratiwi, R., Mutaqin, & Yosepha, S. Y. (2025). How the integration of payment systems through QRIS accelerates economic and financial cooperation in the ASEAN region. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(3), 971–980. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200305>
- Statista. (2025). *Gross domestic product (GDP) of the ASEAN countries from 2020 to 2030 (in billion U.S. dollars)*. <https://www.statista.com/statistics/796245/gdp-of-the-asean-countries/>
- Susilo, J. (2024). Cooperation in digital innovation under the Master Plan on ASEAN Community (MPAC) in Muslim ASEAN countries. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 5(1), 107–125. <https://doi.org/10.20473/ajim.v5i1.54332>
- Talakua, H. D., Situmorang, M. A., Marentek, M. M., Simbolon, S. M. S., & Kumolontang, S. K. D. (2026). QRIS as an instrument for Indonesia's economic statecrafts in facing the global payment system. *Economic and Business Horizon*, 5(2), 113–124. <https://doi.org/10.54518/ebh.5.2.2026.1011>
- Ulum, M. B., Sari, N. K., & Halif. (2026). Regulasi QRIS atas pengembangan metode pembayaran digital di wilayah ASEAN. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 66–82. <https://doi.org/10.61393/heiema.v5i1.412>
- Young, O. R. (1991). Political leadership and regime formation: On the development of institutions in international society. *International Organization*, 45(3), 281–308.
- Yukawa, T. (2017). The ASEAN Way as a symbol: An analysis of discourses on the ASEAN Norms. *The Pacific Review*, 31(3), 298–314. <https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1371211>